

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU-BUKU

*Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.*

*Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.*

*Adami Chazawi, 2017, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.*

*Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.*

*Amiruddin, 2010, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta.*

*Andi Hamzah, 2013, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.*

*Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta*

*Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Depok, 2004.*

*Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*

*Chaerudin DKK, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung.*

*Chairul Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.*

*C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.*

*C.S.T Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1985.*

*Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa, Bandung, Refika Aditama 2003.*

*Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta.*

*Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung.*

*Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.*

*Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar grafika, Jakarta, 2007.*

*Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2014.*

*Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.*

*Kartonegoro, et.al, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.*

*M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang, Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta.*

*Mahrus Ali, Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.*

- Mispansyah dan Amir Ilyas, 2016, Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.*
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.*
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.*
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. Jakarta, 2008.*
- Nanda Agung Dewantara, 1987, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Askara Persada Indonesia, Jakarta.*
- P.A.F Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.*
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999.*
- Safri Nugraha, dkk., 2007, Hukum Administrasi Negara, Center for Law and Good Governance, Jakarta.*
- Soerjono Suekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984.*
- Soerjono Suekanto, Sri Mamudi , Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit (Jakarta: Grafindo Persada, 2003).*
- Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelse Pidana di Indonesia, Yogyakarta : Total Media, 2009.*

*S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya.*

*Alumni : Jakarta. 1982.*

*Teguh Prastyo, Hukum Pidana Materil, Jidil I, (Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005).*

*W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.*

*W.J.S Poerwadarminta, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.*

## **2. PERUNDANG-UNDANGAN**

*Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Alinea keempat, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

*Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

*Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi". Lembaran negara RI 140, tambahan lembaran negara RI 3874.*

*KPK, 2006, Memahami untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai  
Negeri Sipil.*

*Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

*SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SE-  
004/J.A/11/1993 TENTANG PEMBUATAN SURAT DAKWAAN  
Bagian Ke-V*

**3. JURNAL, ARTIKEL ONLINE**

*Hermanita, Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan, diakses dari  
[download.portalgaruda.org](http://download.portalgaruda.org) pada 13 Desember 2021*

